



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
TAHUN 1986-2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURUL ARMIA GULTOM**

**NIM. 16 402 00257**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
TAHUN 1986-2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURUL ARMIA GULTOM  
NIM. 16 402 00257**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
TAHUN 1986-2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*


**Oleh**

**NURUL ARMIA GULTOM**

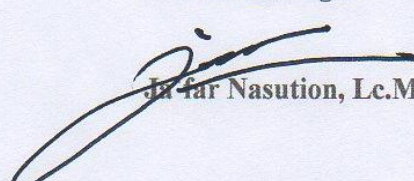
**NIM. 16 402 00257**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd.MM**  
**NIP 19790720 201101 1 005**

**Pembimbing II**

  
**Jufar Nasution, Lc.MA**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Nurul Armia Gultom**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Agustus 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

*AssalamualaikumWr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurul Armia Gultom** yang berjudul "**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

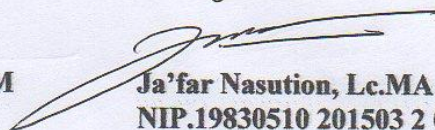
*WassalamualaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M**  
NIP.19790720 201101 1 005

**PEMBIMBING II**



**Ja'far Nasution, Lc.MA**  
NIP.19830510 201503 2 003

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Armia Gultom  
NIM : 16 402 00257  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran  
Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera  
Utara Tahun 1986-2018

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri  
tanpa meminta bantuan yang tidak sah pada pihak lain kecuali arahan dari  
pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa  
pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian  
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya  
bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun  
2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan  
tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang  
berlaku.

Padangsidempuan, 14 Agustus 2020  
Saya yang Menyatakan,



**NURUL ARMIA GULTOM**  
NIM :16 402 00257

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL ARMIA GULTOM

Nim : 16 402 00257

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak bebas *royalty* non eksklusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018”**. Dengan hak bebas *royalty* non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Padatanggal : 14 Agustus 2020

Yang menyatakan,



NURUL ARMIA GULTOM

NIM: 16 402 00257



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NURUL ARMIA GULTOM  
Nim : 16 402 00257  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018.

**Ketua**

**Dr. Kamaluddin, M. Ag**  
NIP. 19651102 199103 1 001

**Sekretaris**

**Rodame Monitorir Napitupulu, MM**  
NIP. 19841130 201801 2 001

**Anggota**

**Dr. Kamaluddin, M. Ag**  
NIP. 19651102 199103 1 001

**Rodame Monitorir Napitupulu, MM**  
NIP. 19841130 201801 2 001

**Dr. Budi Gautama Siregar, MM**  
NIP. 19790720 201101 1 005

**Nurul Izzah, M, Si**  
NIP. 19900122 201801 2 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Oktober 2020  
Pukul : 14.00-16.00 WIB  
Hasil/Nilai : Lulus/72 (B)  
Predikat : PUJIAN  
IPK : 3,71



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

## PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL  
BRUTO DAN PENGELUARAN PEMERINTAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2018

NAMA : NURUL ARMIA GULTOM  
NIM : 16 402 00257

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 26 Oktober 2020  
Dekan,



**Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
NIP.19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama** : Nurul Armia Gultom  
**Nim** : 16 402 00257  
**Judul Skripsi** : **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa tahun di Sumatera Utara pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 2008-2017. Terjadi penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2001 namun produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terjadi peningkatan. Penyebab menurunnya pendapatan asli daerah ialah target penerimaan pajak dan retribusi daerah bukan menjadi kinerja utama organisasi perangkat desa, kurangnya kepatuhan masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah secara jujur, dan pengelolaan yang salah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.

Teori Chakim dalam jurnal penelitian *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* mengatakan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga menurut Arief Eka Atmaja jurnal penelitian *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder jenis *time series*. Data penelitian ini mulai tahun 1986-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan menggunakan alat *eviews 9*.

Adapun hasil estimasi penelitian ini menunjukkan nilai ( $R^2$ ) sebesar 0,879699. Angka tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah mampu menunjukkan pendapatan asli daerah sebesar 87,96 persen dan sisanya 12,04 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah dan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Ilahi Rabbi yang masih berkenan menyatukan jasad, ruh dan akal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 1986-2018”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang menjalankan sunnahnya.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis sebelum maupun sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

maupun sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan dan Sekretaris Prodi.
4. Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd.MM sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc.MA sebagai dosen pembimbing II, peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
5. Serta seluruh Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Khususnya kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu peneliti dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Humn Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Ramlan Gultom dan Ibunda tercinta Rosmanita Siagian yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kakak peneliti Dewani Gultom dan Kamila Dewi Gultom, serta Abang peneliti Nasrul Gultom, Urat Panaehan Gultom, Sulthoni Gultom, Adi Saputra Gultom, Alin Saputra Gultom, dan Ian Saputra Gultom yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Ekonomi Syariah 1 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Untuk komunitas Beasiswa GenBi (Generasi Baru Indonesia) yang berada dibawah naungan Bank Indonesia cabang Sibolga yang telah banyak

memberi bantuan berupa materi, pengalaman, dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini..

11. Serta terima kasih kepada sahabat-sahabatku Gustiah, Siti Aisyah, Miftahul Jannah Tambak, Roslaini, Tuti Amma Sari Siregar, Murni Lubis, Sry Septiana Gultom, Alyah Gultom dan Tiwi Siregar yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada peneliti agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kekurangan masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, serta pembuatan skripsi selanjutnya. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi peneliti, pembaca dan dapat menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Padangsidempuan,  
Peneliti,

Agustus 2020

**NURUL ARMIA GULTOM**  
**NIM : 16 402 00257**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	A
--- ِ ---	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب → *kataba*      يذهب → *yadzhabu*  
 سئل → *su'ila*      كرد → *kuridza*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي -- َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و -- َ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa*      هول → *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

- b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

- c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

- d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*



## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana*      نَعَم → *na'ima*

## 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*      أمرت → *umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima, 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Definisi Operasional Variabel .....	8
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	10
H. Sistematika pembahasan .....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kerangka Teori .....	13
1. Pendapatan Asli Daerah .....	13
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	13
b. Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW .....	16
c. Pajak Daerah .....	18
d. Jenis dan Objek Pajak Daerah .....	19
e. Retribusi Daerah .....	21
2. Produk Domestik Regional Bruto .....	24
a. Pengertian Produk domestik regional bruto .....	24
b. Metode Produk domestik regional bruto .....	25
c. Sumber-sumber produk domestik regional bruto .....	28
d. Manfaat produk domestik regional bruto .....	29
3. Pengeluaran Pemerintah .....	31
a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah .....	31
b. Teori Pengeluaran pemerintah .....	32
c. Pembagian pengeluaran pemerintah .....	34
d. Pengeluaran pemerintah dalam islam .....	35
4. Pengaruh Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli	

Daerah.....	36
5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	37
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikir.....	41
D. Hipotesis .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Instrument Pengumpulan Data .....	46
1. Studi Dokumentasi .....	46
2. Studi Kepustakaan .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	48
1. Statistik Deskriptif .....	48
2. Uji Normalitas .....	48
3. Uji Linearitas.....	49
4. Uji Asumsi Klasik.....	49
a. Uji Multikolinearitas .....	49
b. Uji Autokorelasi .....	49
c. Uji Heteroskedastisitas.....	50
5. Analisis Regresi Berganda .....	50
6. Pengujian Hipotesis.....	51
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	51
b. Uji Koefisien Secara Regresi Secara Parsial (t).....	51
c. Uji Koefisien Secara Simultan (F) .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara .....	53
2. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara.....	54
B. Gambaran Umum Data Penelitian .....	56
1. Pendapatan Asli Daerah .....	56
2. Produk domestik regional bruto.....	57
3. Pengeluaran pemerintah.....	59
C. Hasil Analisis Data .....	61
1. Statistik Deskriptif .....	61
2. Uji Normalitas.....	62
3. Uji Linieritas .....	63
4. Uji Asumsi Klasik.....	64
a. Uji Multikolinearitas .....	64
b. Uji Heteroskedastisitas .....	65
c. Uji Autokorelasi .....	66
5. Hasil Estimasi Regresi Berganda.....	67

6. Uji Hipotesis .....	69
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
b. Uji Koefisien Regresi Secara parsial (t) .....	70
c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (F) .....	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	73
E. Keterbatasan Penelitian .....	76

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Pendapatan Asli Daerah 1986-2018 .....	2
Tabel I. 2	Definisi Operasional Variabel .....	8
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel IV.4	Statistik Deskriptif.....	61
Tabel IV.6	Uji Linieritas.....	64
Tabel IV.7	Uji Multikolinearitas .....	65
Tabel IV.8	Uji Heteroskedastisitas .....	66
Tabel IV.9	Uji Autokorelasi .....	67
Tabel IV.10	Hasil Regresi Berganda .....	68
Tabel IV.11	Uji $R^2$ .....	70
Tabel IV.12	Uji t.....	71
Tabel IV.13	Uji F.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2	Kerangka Pikir .....	41
Gambar IV.1	Gambar Pendapatan Asli Daerah Tahun 1986-2018 .....	57
Gambar IV.2	Gambar Produk domestik regional bruto Tahun 1986-2018 .....	59
Gambar IV.3	Gambar Pengeluaran Pemerintah Tahun 1986-2018 .....	60
Gambar IV.5	Uji Normalitas .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018
- Lampiran 2 Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018
- Lampiran 3 Data Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986- 2018
- Lampiran 4 Data mentah Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
- Lampiran 5 Data mentah Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
- Lampiran 6 Data mentah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018
- Lampiran 7 Data mentah Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto tahun 1986 dan 1987
- Lampiran 8 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 12 Hasil Regresi Berganda



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna mengukur tingkat otonomi daerah. Konsep *Istihlaf* atau tanggung jawab amanah dalam setiap individu atau kelompok merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah-daerah dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok utama yakni: sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber Pendapatan non-asli daerah (non PAD). Widjaya menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembenagunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari daerah yang

---

<sup>1</sup> Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, “Analisi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan ,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* Volume 1, No.1 (2013): h. 10.

bertujuan untuk pembangunan daerah guna menciptakan kemandirian suatu daerah untuk membiayai daerahnya sendiri.

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan. Sumatera Utara dibagi 25 Kabupaten, 8 Kota, 325 Kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa dengan luas wilayah 72.981,23 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 14.102,911 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016. Sumatera Utara dikenal akan keindahan alamnya yang luas dan kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan hasil laut.

Untuk itu pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini terlihat data realisasi Penerimaan Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 1986-2018.

**Tabel I.1**  
**Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara Tahun 1987-2018**  
**(Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>(Miliar Rupiah)</b>
<b>1986</b>	23.046.000
<b>1987</b>	56.724.000
<b>1988</b>	72.116.000
<b>1989</b>	80.692.000
<b>1990</b>	90.572.000
<b>1991</b>	97.089.000
<b>1992</b>	114.284.000
<b>1993</b>	131.478.000
<b>1994</b>	153.349.000
<b>1995</b>	156.515.000

<b>1996</b>	187.738.000
<b>1997</b>	255.078.000
<b>1998</b>	396.469.000
<b>1999</b>	437.075.000
<b>2000</b>	255.100.000
<b>2001</b>	423.100.000
<b>2002</b>	614.400.000
<b>2003</b>	908.300.000
<b>2004</b>	1.143.100.000
<b>2005</b>	1.018.000.000
<b>2006</b>	1.368.200.000
<b>2007</b>	1.503.000.000
<b>2008</b>	2.181.300.000
<b>2009</b>	2.016.070.000
<b>2010</b>	2.226.500.000
<b>2011</b>	3.181.890.000
<b>2012</b>	4.052.100.000
<b>2013</b>	4.809.370.000
<b>2014</b>	3.449.002.150
<b>2015</b>	4.089.547.297
<b>2016</b>	4.541.639.863
<b>2017</b>	4.925.627.725
<b>2018</b>	5.732.425.486

**Sumber: www. BPS di Olah**

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari Tahun 1986-1999 dari Rp. 23 Miliar hingga Rp. 437 Miliar. Kemudian pada Tahun 2000 mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 255 Miliar Kemudian untuk Tahun selanjutnya PAD meningkat kembali dari Tahun 2001-2004 mencapai Rp. 1.143 triliun dan menurun pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.018 triliun dan pada tahun 2008 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Selanjutnya PAD meningkat secara terus menerus hingga tahun 2018 sebesar Rp. 5.732 triliun.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah dimana kedua variable tersebut merupakan hubungan

yang fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya.

Perkembangan perkembangan PDRB yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018, dilihat dari data BPS Sumut bahwa PDRB di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dimana dari tahun 1986 senilai Rp. 26 Miliar dan 2018 PDRB mencapai Rp. 741 Miliar.

Selain PDRB faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pengeluaran pemerintah dimana pemerintah harus memulai terlebih dahulu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan daerah secara merata.

Pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Sumut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun 1998 pengeluaran pemerintah menurun menjadi Rp. 342 juta kemudian

meningkat kembali tahun 1999 sebesar Rp. 449 juta dan menurun pada tahun 2000. Kemudian meningkat kembali hingga tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 7,6 miliar dan tahun 2013 menurun sebesar Rp. 7,2 miliar dan untuk tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan mencapai Rp. 13,8 miliar pada tahun 2018.

Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dilihat dari Tahun 2009-2015 PDRB naik secara normal Rp. 236 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 571 juta, namun nilai Pengeluaran Pemerintah mengalami fluktuasi pada tahun 1998 nilai pengeluaran pemerintah menurun kemudian tahun selanjutnya meningkat hingga mencapai Rp. 7,6 milyar pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 7,2 miiyar dan tahun selanjutnya pengeluaran pemerintah terus-menerus meningkat. Kemudian PAD juga mengalami fluktuasi dilihat dari tahun 1986 PAD senilai Rp. 23 dan terus meningkat hingga tahun 1999 sebesar Rp. 437 miliar dan tahun 2000 mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 255 miliar kemudian meningkat kembali hingga tahun 2004 sebesar Rp. 1.143 triliun dan tahun 2005 menurun PAD sebesar Rp. 1.018 triliun dan tahun selanjutnya PAD mengalami peningkatan dan di tahun 2014 mengalami penurunan kemudian 2015-2018 PAD terus-menerus meningkat hingga PAD mencapai sebesar Rp. 5.732 triliun.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, apabila penerapan tujuan pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan diakibatkan

anggaran pendapatan daerah yang didapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata jelas dalam islam hal itu dilarang karena munculnya ketidakadilan dalam masyarakat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Umdhatul bahwa:

“Hasil penelitian yang didapat menunjukkan secara parsial bahwa variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD, inflasi tidak mempengaruhi PAD dikota se Jawa Tengah”.<sup>2</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu mengikat pada tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam dan lokasi yang diteliti oleh penelitan terdahulu belum ada di Sumatera Utara, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Maka dari itu, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara Tahun 1986-2018”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

---

<sup>2</sup> Umdhatul, “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Inflasi Terhadap PAD (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga,” 2016, h, 67.

<sup>3</sup> Triani dan Yeni Kuntari, “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 Di Kabupaten Karanganyar (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah ),” 2016, h, 56.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadi fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diiringi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih sering diiringi dengan peningkatan produk domestik regional bruto.
4. Penurunan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diiringi dengan penurunan produk domestik regional bruto .
5. Penurunan Pendapatan Asli Daerah lebih sering diiringi dengan penurunan pengeluaran pemerintah.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan dibatasi dengan menggunakan tiga variabel yaitu terdiri dari dua variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ( $X_1$ ), dan Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ ), dan satu variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $Y$ ). dalam penelitian ini yang diteliti adalah Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2018 melalui data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

### **D. Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian ini, terdapat istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian, sehingga dibuatlah definisi operasional variabel untuk menjelaskan istilah yang dipakai dalam penelitian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel I.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator Variabel	Skala
Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ )	Produk domestik Bruto Regional merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. <sup>4</sup> Maka yang dimaksud adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah Sumatera Utara dari tahun 1986-2018.	1. Pendekatan produksi 2. Pendapatan <sup>5</sup>	Rasio
Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ )	Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah. <sup>6</sup> Maka yang dimaksud adalah tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian daerah Sumatera Utara dari tahun 1986-2018.	1. Pengeluaran rutin 2. Pengeluaran pembangunan <sup>7</sup>	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara tahun	1. Pajak daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan 4. Kekayaan daerah yang dipisahkan	Rasio

<sup>4</sup> “Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.Bps.Go.Id,” n.d.

<sup>5</sup> Rosita Wahyuningtyas, “Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB’ Jurnal Gaussian, , Tahun ,” Volume, Nomor 3 (2013): h, 224.

<sup>6</sup> Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga* (Yogyakarta, 2010), h, 160.

<sup>7</sup> Todaro, MP. Dan S.C Smith, *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris* (Jakarta Ghalia: Indonesia, 2006), h, 110.



	1986-2018 yang digunakan dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara	5. Lain-lain pendapatan yang sah <sup>8</sup>	
--	---	---	--

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian rumusan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018 ?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018 ?
3. Apakah ada pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018 ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.

---

<sup>8</sup> Muhammad Safar Nasir, “‘ Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah’ Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Tahun:” Volume 2, Nomor, (2019): h, 34.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Utara

### **2. Bagi Peneliti**

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peneliti tentang materi mengenai pengaruh produk domestik regional dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam membuat bahan referensi melalui telaah literatur dan data.

### **3. Bagi Institusi**

Sebagai bahan kajian lembaga dan pemikir ekonomi tentang pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah terkhusus segala yang berkaitan dengan penulisan ini.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan kajian bagi masyarakat untuk menambah pemahaman mengenai pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian proposal yang berjudul pengaruh domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara tahun 1986-2018. Mengacu pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Adapun sistematika pada penelitian ini adalah:

**BAB I** Pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian.

**BAB II** landasan teori membahas tentang pengertian pendapatan asli daerah sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah, jenis dan objek pajak daerah, retribusi daerah, pengertian produk domestik regional bruto, metode perhitungan produk domestik regional bruto, sumber-sumber produk domestik regional bruto, manfaat produk domestik bruto, pengertian pengeluaran pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, pembagian pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah dalam islam, hubungan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah, hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah.

**BAB III** metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, jenis data, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian**, di dalamnya memuat tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian. Secara umum, mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam metode penelitian sehingga memperoleh hasil analisa yang akan dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

**Bab V Penutup**, di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Islam memberikan petunjuk atas aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkan syariat islam yaitu untuk mencapai *Al-falah* (kesejahteraan) dunia maupun akhirat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi. Secara ekonomi, dengan otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efeisiensi kinerja kerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumberdaya manusia daerah itu sendiri.<sup>9</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

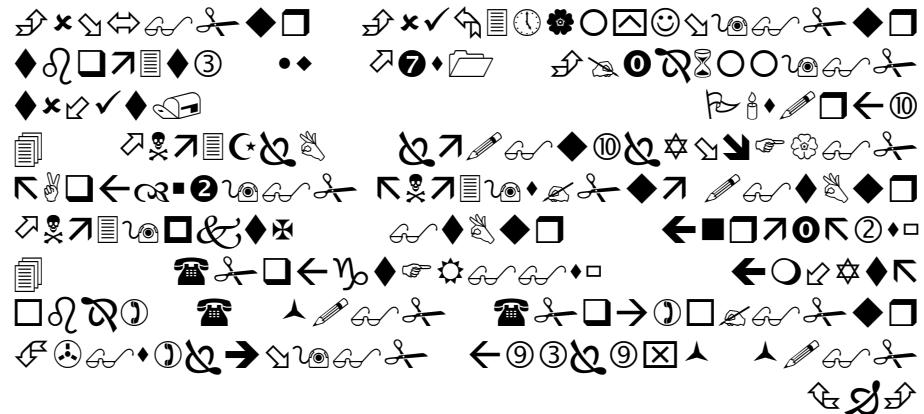
---

<sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, , *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*, : GRAHA ILMU (Yogyakarta, 2013), h, 23.

Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain. Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi wilayah dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 menerangkan tentang pentingnya pemberian kontribusi pendapatan.





7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya<sup>10</sup>.

Penjelasan ayat diatas menerangkan tentang pentingnya menyalurkan pendapatan guna mencegah agar harta tidak berputar hanya dikalangan orang-orang kaya yang telah tercukupi kebutuhannya, sehingga pemerataan pendapatan tercapai dan meningkatkan kesejahteraan umat disekitarnya. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW berupa: *zakat, kharaj, ghanimah, fa'l, jizyah, dan khums.*

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber

<sup>10</sup> “Kementrian Agama Republik Indonesia, ‘Terjemahan Dan Tafsir Al-Qur’an Hasyr Ayat 7’ Qur’anWeb.Id ( Http.Quran.Kemenag.Go.Id, Diakses 18 Mei 2020 Pukul 04.42 WIB),” n.d.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing masing.

## **b. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Rasulullah SAW**

### 1). *Zakat*

Sumber pemasukan pertama yaitu zakat, sebagaimana diwajibkan dalam al-qur'an surat At-taubah:60 Pengeluaran *zakat* dikhususkan sesuai *mustahif zakat* yang dijelaskan Al-qur'an. *Zakat* menurut istilah artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

### 2). *Zakat Fitrah*

Sumber pemasukan kedua yaitu zakat fitrah, adalah zakat yang ditunaikan pada setiap bulan ramadhan, besarnya satu *sha'* (sama dengan 8/3kilo) dari makanan pokok kaum muslim.

### 3). *Ushr*

*Ushr* merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Sebesar 2,5 persen.

### 4). *Amwal Fadhila*



Sumber pendapatan negara *amwal fadhila* adalah harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya.

5). *Wakaf*

*Wakaf* adalah harta benda yang didedikasikan kepada kaum muslimin yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositkan di *baitul mal*.

6). *Nawaiib*

Sumber pemasukan selanjutnya adalah *nawaiib* adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.

7). *Shadaqah*

Dalam istilah berarti pembuktian keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Sumber pemasukan dari *shadaqah* adalah Qurban dan *khaffarat*.

8). *Khums*

*Khums* atau *rikaz* adalah harta karun temuan pada periode sebelum islam.

9). *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari *non-muslim* (orang yang bukan muslim) kepada pemerintah

islam. *Jizyah* dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

10). *Kharaj*

*Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, yang mana diambil dari tanahnya *non-muslim* (orang yang bukan muslim) yang sudah ditaklukkan dan tanah tersebut sudah diambil oleh orang muslim.

**c. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>11</sup>. Hal ini berkaitan dengan pengoptimalan kenangan keuangan publik. Apabila masyarakatnya bertanggung jawab dan patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pemerintah yang didedikasikan untuk pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan. Pengoptimalan keuangan publik ini pula agar terjadinya distribusi pendapatan yang merata sehingga tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Chairul Anwar Pohan, , *Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*, (: Mitra Wacana Media, ) (Jakarta, 2017), h, 52.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### **d. Jenis dan Objek Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan dihotel .
- b) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- c) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- d) Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penrangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

---

<sup>12</sup> Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (:Mitra Wacana Media,)* (Jakarta, 2010), h, 119-128.

g) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### **e. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>13</sup>

Sedangkan Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>14</sup>

Retribusi Daerah dari beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, , *Perpajakan Edisi Revisi Tahun ,(: CV ANDI OFFSET)* (Yogyakarta, 2011), h, 56.

<sup>14</sup> Budi Waliyo, *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Dan Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industry Terhadap PAD Kota , (Skripsi:Universitas Gunadarma,)* (Depok Jawa Barat, 2012), h, 32.

pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.

#### 2) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Produksi Usaha Daerah.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek.

### 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat.

#### 5). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil penjualan barang milik daerah, Jasa Giro, Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

## **2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**



Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional.<sup>15</sup>

PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing.<sup>16</sup> PDRB adalah hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Beberapa pengertian PDRB diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto dari segala kegiatan perekonomian suatu wilayah tertentu.

#### **b. Metode Perhitungan PDRB**

Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB atau harga berlaku dan PDRB atas harga konstan, yang dimana PDRB atas harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada

---

<sup>15</sup> Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah ( GRAHA ILMU)* (Yogyakarta, 2013), h, 5.

<sup>16</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar, (: PT. Raja Grafindo Persada )* (Jakarta, 2011), h, 35.

tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Metode perhitungan PDRB dibagi menjadi dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penjelasan sebagai berikut :

#### 1). Metode Langsung

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

##### a). Pendekatan produksi

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sector atau subsector tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya. Nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang

ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

b). Pendekatan pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, *surplus* usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

c). Pendekatan pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto dimana nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor menjadi nilai ekspor neto. Penjumlahan seluruh

komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

## 2). Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke seluruh wilayah bagian Indonesia menggunakan alokator tertentu.<sup>17</sup> Alokator alokator tersebut yang dapat digunakan diantaranya, yaitu: Nilai produksi bruto atau neto pada wilayah yang dialokasikan, Jumlah produksi fisik, Tenaga kerja, dan Penduduk.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

### c. Sumber-Sumber PDRB

PDRB diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana dari indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak PDRB. Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat PDRB yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi*, (: PT. Bumi Aksara,) (Jakarta, 2015), h, 25.

### 1). Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang memiliki pendapatan perkapita meningkat dari pada periode sebelumnya.

### 2). Tenaga kerja dan pengangguran

Tenaga kerja dan pengangguran adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja, suatu negara dikatakan memiliki PDRB jika jumlah tenaga kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

### 3). Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat PDRB. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **d. Manfaat Produk Domestik Bruto**

Sebagai suatu alat ukur perekonomian, PDB memiliki beberapa manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1). Mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional

Dengan adanya PDB, negara dapat mengetahui sudah sejauh mana perekonomian dalam negernya tumbuh. Negarapun dapat menganalisis dari data yang ada terkait faktor manakah yang dapat dimaksimalkan dan mana yang masih perlu ditingkatkan.

2). Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara

Setiap negara memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Masalahnya, tanpa ada alat ukur, kelebihan serta kekurangan menjadi sesuatu yang sangat sulit dibuktikan. Melalui angka yang dihasilkan PDB negara-negara di dunia yang dapat menentukan siapa yang unggul siapa yang masih belum. Keluarannya adalah apa yang kini kita kenal sebagai G7 dan G20 yang terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia.

3). Mengetahui struktur perekonomian suatu negara

Negara bersangkutan dapat menjadikan keluaran PDB-nya sebagai bahan pengkajian terkait setor-sektor mana saja yang harus ditingkatkan dan perlu perbaikan.

#### 4). Sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah

Tanpa adanya data yang bisa diandalkan, kebijakan yang dihasilkan suatu negara akan sulit untuk dipastikan apakah akan berhasil atau tidak. Namun dengan adanya data pemerintah dapat memperoleh bantuan dalam merumuskan kebijakan.

### 3. Pengeluaran Pemerintah

#### a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program.

Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono Sukirno adalah pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran negara pada masa Rasulullah SAW digunakan untuk pendidikan, pembangunan armada perang,

---

<sup>18</sup> Guritno Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, (: BPEE, )* (Yogyakarta, 2010), h, 169.

penyediaan pelayanan kesejahteraan berupa subsidi negara untuk kaum *fuyaha* dan *masakin* (orang-orang yang tidak mampu).

Beberapa pengertian pengeluaran pemerintah maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa.

### **b). Teori Pengeluaran Pemerintah**

Adapun teori-teori perkembangan pengeluaran pemerintah yakni:

#### 1). Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar pula banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah

---

<sup>19</sup> Sirojuzilan, *Regional Pembangunan, Perencanaan, Ekonomi*, (: USU Press, ) (Medan, 2011), h, 11.



harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

## 2). Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP, mmenurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya. Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang disebut *organictheory of state*. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak.

## 3). Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiaya pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan

meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan peneluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar.

### **c. Pembagian pengeluaran pemerintah**

#### 1). Belanja pemerintah pusat

Pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, subsidi BBM dan subsidi non BBM, pembayaran bunga utang dalam negeri dan utang luar negeri.

#### 2). Belanja daerah

Belanja daerah meliputi pengeluaran untuk dan perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dan alokasi khusus (DAK).

#### 3). Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi daerah.

4). Dana alokasi umum

Dana alokasi umum adalah bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan pengawasan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah.

5). Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertical antar pusat dan daerah.

6). Pengeluaran rutin pemerintah

Pengeluaran rutin pemerintah adalah pengeluaran digunakan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

**d. Pengeluaran pemerintah dalam Islam**

Islam menempatkan manusia sebagai focus pembangunan. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyuruh umat manusia yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan ataupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia itu pada ke Esaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam islam, oleh karena itu faktor etika, moral dan spiritual merupakan faktor pembentuk aspek kualitas. Indikator keberhasilan suatu

pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin terjadinya perubahan, baik perubahan teknologi maupun sosial ekonomi. Peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam islam. Tujuan pembangunan dalam islam adalah tercapainya kesuksesan di dunia dan juga akhirat.

#### **4. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB). Chakim berpendapat bahwa:

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara produk domestik regional bruto dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah produk domestik bruto mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

---

<sup>20</sup> Hening Fitria Sarasati El Rani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, Studi Kasus Dikabupaten/Kotan Pekalongan Periode ”, (Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah),” 2014 2005, h, 7.

## **5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembagunanan dan sebaagian lain untuk pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

Menurut Arief Eka Atmaja:

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public menunjang kegiatan ekonomi dalam hal ini pemerintah menetapkan pajak dan retribusi yang akan menambah PAD.<sup>21</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan Hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD sangat jelas, apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik dan pelayanan publik hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Meningkatnya kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga

---

<sup>21</sup> Hening Fitria Sarasati El Rani, h, 6.

memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

## B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran peneliti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan dalam penelitian ini, adapun penelitian-penelitian terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	Indahsari Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN tulungagung (Dalam skripsinya tahun 2019) <sup>22</sup>	Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur 2016-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah.
2	Eni Erviana UIN Raden Intan Lampung (Dalam skripsinya tahun 2018) <sup>23</sup>	Analisis pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2006-2015	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah lampung.
3	Ikhawanuddi	Pengaruh	Hasil penelitian menunjukkan

<sup>22</sup> “[Http:// Repo. Iain-Tulungagung.Ac.Id,](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id)” n.d.

<sup>23</sup> “[Http://Repository.Radenintan.Ac.Id,](http://Repository.Radenintan.Ac.Id)” n.d.

	n Harahap (Dalam jurnal ilmu ekonomi dan keislaman volume 6 issue 2 tahun 2018) <sup>24</sup>	jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara	bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di provinsi Sumatera Utara. Secara simultan terdapat pengaruh jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD di provinsi Sumatera Utara.
4	Hening Fitria Sarasati El Rani Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (dalam skripsinya tahun 2014) <sup>25</sup>	Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 2016-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah.
5.	Triani dan Yeni Kuntari di Kabupaten Karanganyar (dalam jurnalnya vol.12 No 1 ISSN 1693.928 Y tahun 2010) <sup>26</sup>	pengaruh variabel makro terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) periode 2003-2007 di kabupaten Karanganyar”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu mengikat tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negative terhadap penerimaan PAD. Dan secara simultan keseluruhan variabel makro yaitu PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD
6	Eni Aryanti dan Iin Indarti (dalam jurnal	Pengaruh variabel makro terhadap pendapatan asli	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa secara simultan variabel PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan

<sup>24</sup> “Virifield Email at Iain-Padangsampung.Ac.Id,” n.d.

<sup>25</sup> “Repository.Umy.Ac.Id,” n.d.

<sup>26</sup> “Journal. Widyamanggala.Ac.Id,” n.d.

	kajian akuntansi dan bisnis Vol.1 no. 1 tahun 2012) <sup>27</sup>	daerah periode 2000-2009 di kota semarang	terhadap PAD, sedangkan secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota semarang.
--	---	---	--

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dikakukan oleh Indahsari dengan menggunakan Pendapatan Asli daerah sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya penelitian Indahsari menggunakan 3 variabel X yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk. Kemudian lokasi yang digunakan oleh Indahsari adalah di provinsi Jawa timur sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni Erviana dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y dan menggunakan dua variabel X yaitu PDRB dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan perbedaannya penelitian Eni Erviana menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai  $X_1$  dan PDRB sebagai variabel  $X_2$ . Kemudian lokasi yang digunakan oleh Eni Erviana adalah di kota Bandar Lampung sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>27</sup> www.neliti.com



- c. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhwanuddin Harahap dengan menggunakan pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y dan Variabel X2 nya menggunakan Pengeluaran pemerintah dan lokasi penelitian yang digunakan sama yaitu di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan perbedaannya terletak pada X1 yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu jumlah penduduk.
- d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hening Fitria dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y dan PDRB, Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai variabel X. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Hening fitria meneliti Di Kabupaten/Kota Pekalongan, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Triani dan Yeni Kuntari dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya variabel X dari penelitian Triani dan Yeni Kuntari ada 3 yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan inflasi sedangkan dalam penelitian ini variabel X nya adalah PDRB dan pengeluaran pemerintah. Kemudian lokasi yang digunakan oleh Triani dan Yeni Kuntari adalah di kabupaten Karangayar sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara.
- f. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni Aryanti dengan menggunakan Pendapatan Asli

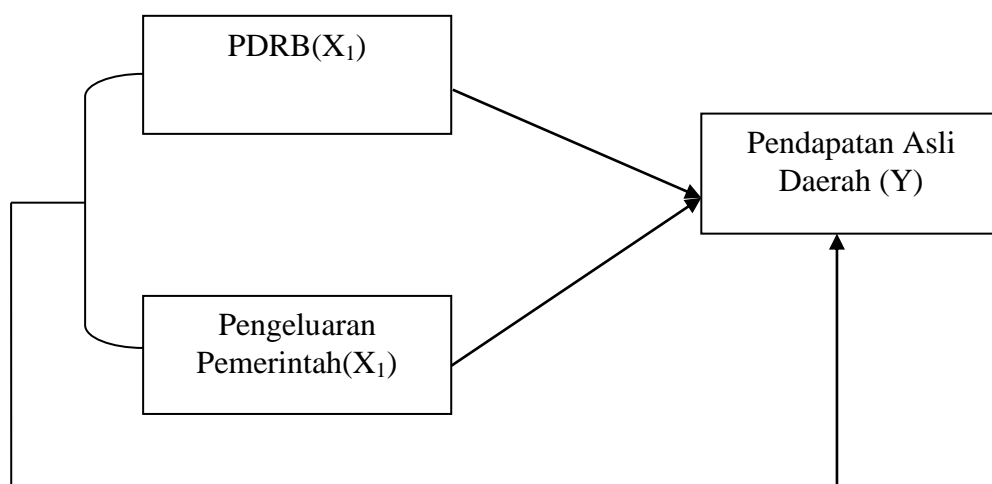
Daerah sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya variabel X dari penelitian Eni Aryanti ada 3 yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan inflasi sedangkan dalam penelitian ini variabel X nya adalah PDRB dan pengeluaran pemerintah. Kemudian lokasi yang digunakan oleh Eni Aryanti adalah di Kota Semarang sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara.

### C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut.

Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara parsial PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan secara parsial Pengeluaran Pemerintah juga dapat mempengaruhi pendapatan

asli daerah. Kemudian secara simultan juga terlihat bahwa PDRB (variabel  $X_1$ ) dan pengeluaran pemerintah (variabel  $X_2$ ) dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (variabel  $Y$ ) Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain semakin tinggi jumlah PDRB dan pengeluaran pemerintah maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>28</sup>

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.

Hipotesis penelitian ini adalah:

$H_1$  : Ada pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.

$H_2$  : Ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.

$H_3$  : Ada pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (: Alfabeta, ) (Bandung, 2012), h, 93.

## **. BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Penelitian ini dimulai bulan Maret 2020 hingga penyelesaian laporan penelitian yang akan disusun oleh peneliti pada bulan Agustus 2020.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.

Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yaitu dari total nilai PDRB atas harga konstan, Total Pengeluaran Pemerintah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tersusun dari tahun 1986-2018 berupa data runtut waktu (*time series*) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, Al-Qur'an, dan Internet.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>29</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah, data Produk Domestik Regional Bruto, data Pengeluaran Pemerintah, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara melalui link [Sumut.bps.go.id](http://Sumut.bps.go.id) data dari tahun 2014-2018 dan data Tahun 1986-2013 diambil dari Badan Pusat Statistik yang diakses oleh Fitri Ani Siregar sehingga populasi kurun waktu 33 Tahun.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel juga dapat di definisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.

Namun sampel dalam penelitian ini adalah penelitian populasi. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *non purposive sampling* yaitu sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel. Istilah lain dari teknik sampel jenuh adalah

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 80

sensus.<sup>30</sup> Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1986 sampai Tahun 2018 dengan sampel kurun waktu yang berjumlah 33 sampel.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Data yang umum kita kenal sekarang ini merupakan bentuk jamak dari *datum*, yang berasal dari bahasa latin. Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita.<sup>31</sup>

Instrument pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen adalah data-data yang tersedia dan sebelumnya telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 1986-2018. Untuk mengukur

---

<sup>30</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 79.

<sup>31</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 118.

pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara maka data yang diperlukan yaitu:

a. Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ )

Nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan menggunakan pendekatan pendapatan yakni dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto.

$$X_1: \text{Upah dan Gaji} + \text{Surplus Usaha} + \text{Penyusutan} + \text{Pajak Tak Langsung}$$

b. Pengeluaran Pemerintah ( $X_2$ )

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

$$X_2: \text{Pengeluaran Rutin} + \text{Pengeluaran Pembangunan}$$

c. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Rumus menghitung Pendapatan Asli Daerah ialah:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah}$$

## 2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

### 1. Statistik Deskriptif

Menjelaskan cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun tabel distribusi frekuensi grafik maupun batang diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, mean, dan variasi kelompok melalui rentang simpang baku. Statistik deskriptif adalah gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Keputusan berdistribusi normal atau tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat signifikansi 0,05 persen. Apabila nilai probabilitas JB hitung lebih besar



dari 0,05 persen maka residual berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai probabilitas JB lebih kecil dari 0,05 persen maka residual tidak berdistribusi normal.

### 3. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear, dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear jika signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.

### 4. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dan ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik *Multikolinearitas*, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi<sup>32</sup>. Ada atau tidaknya gangguan *multikolinearitas* dapat diketahui jika koefisien korelasi diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.8, maka terjadi *multikolinearitas*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Agus Widarjono, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 135

<sup>33</sup>Imam Ghazali, Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), h. 83

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada atau tidaknya autokorelasi dilihat dengan uji Durbin Watson (DW Test) dengan menggunakan uji Run Test dengan nilai signifikan 0,05.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *white*.<sup>34</sup>

### 5. Analisis Regresi Berganda

Dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan alat analisis ekonometrika,<sup>35</sup> yaitu meregresikan variabel-variabel yang ada dengan *Ordinary Least Squares* (OLS). Data-data yang digunakan dianalisis

---

<sup>34</sup>Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 46.

<sup>35</sup>Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 51.

secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik, yaitu analisis linear berganda.

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$PAD = a + b_1 PDRB + b_2 PP + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta perpotongan garis pada sumbu X

$b_1 b_2$  = Koefisien regresi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PP = Pengeluaran Pemerintah

e = *Error term*

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai  $X_1$ , Pengeluaran Pemerintah (PP) sebagai  $X_2$ , terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Y di Provinsi Sumatera Utara.

## 6. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Yang ukurannya adalah semakin tinggi  $R^2$  maka garis regresi sampel semakin baik juga. Jika  $R^2$  mendekati 1 maka

variabel independen mampu menjelaskan perubahan dari variabel dependen. Tetapi jika  $R^2$  mendekati 0, maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen.

b. Uji Koefisien Regresi Secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (Produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah).. Bila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka pada tingkat kepercayaan tertentu  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Anova atau analisis varian, yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikansi 0.05. Adapun kriteria pengujian hipotesis uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Jika  $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB, Pengeluaran Pemerintah, terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ....*, *Op. Cit.*, hlm. 163.

- 2) Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB, Pengeluaran Pemerintah, terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji F jika dilihat berdasarkan signifikansinya:

- a). Jika signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- b). Jika signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement Van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, di pimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan, Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumater Timur dan Keresidenan Tapanuli<sup>37</sup>.

Pada awal tahun 1949, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Perubahan demikian ini ditetapkan dengan keputusan pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 N0. 21/Pem/P.D.R.I, yang diikuti Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949 N0. 22/Pem/P.D.R.I, jabatan gubernur Sumatera Utara ditiadakan, Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-undang

---

<sup>37</sup> “Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka 2012 (Medan: BPS.), Hlm. 81,” 2012.

No. 5 tahun 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi Provinsi Aceh.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada  $1^{\circ}$ - $4^{\circ}$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}$  -  $100^{\circ}$  Bujur Timur, Luas dataran Provinsi Sumatera Utara 72,981 dan 23  $\text{Km}^2$  Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

1. Pesisir Timur
2. Pegunungan Bukit Barisan
3. Pesisir Barat
4. Kepulauan Nias

## **2. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara**

Provinsi Sumatera Utara berada dibagian barat Indonesia, terletak pada garis  $1^{\circ}$ - $4^{\circ}$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}$  - $100^{\circ}$  Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan negara Malaysia di selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.<sup>38</sup>

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam tiga kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai barat, dataran tinggi,

---

<sup>38</sup> “Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka 2018 (Medan: BPS, 2018), Hlm. 5,” n.d.

dan pantai timur. Kawasan pantai barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan batu, Kabupaten Labuhan batu Utara, Kabupaten Labuhan batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-Pulau Batu, serta beberapa Pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian Timur Pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km<sup>2</sup> atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km<sup>2</sup> atau



sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara. Karena terletak dekat garis Khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. .

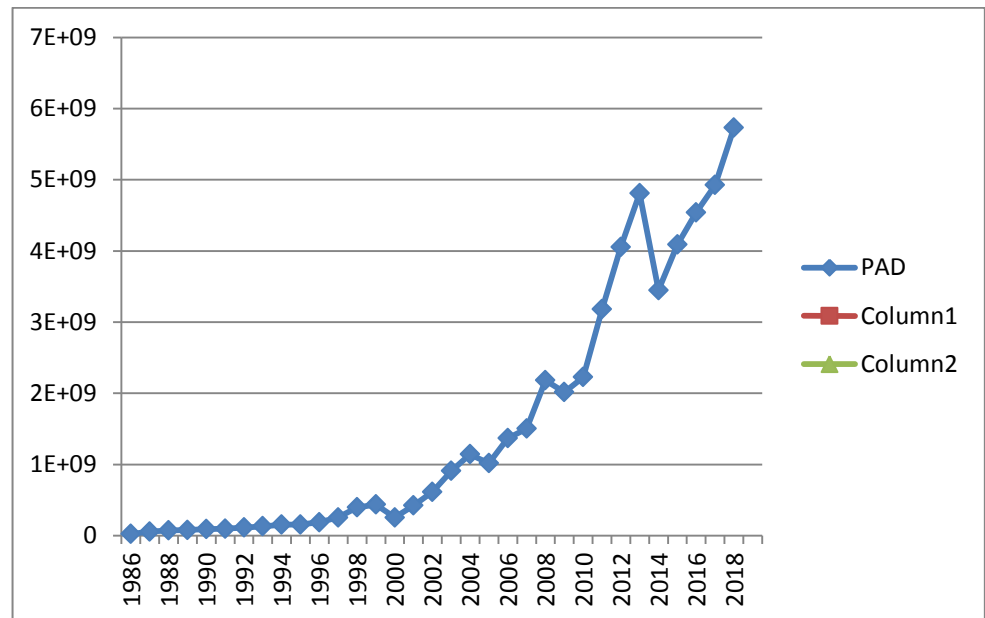
## **B. Gambaran Umum Variabel Penelitian**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber PAD.

Perkembangan pendapatan asli daerah yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan dalam pendapatan asli daerah. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut:

**Gambar IV.1**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara Tahun 1986-2018**



Berdasarkan gambar IV.1 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari Tahun 1986-1999 dari Rp. 23 Miliar hingga Rp. 437 Miliar. Kemudian pada Tahun 2000 mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 255 Miliar. Kemudian untuk Tahun selanjutnya PAD meningkat kembali dari Tahun 2001-2004 mencapai Rp. 1.143 triliun dan menurun pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.018 triliun dan pada tahun 2008 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Selanjutnya PAD meningkat secara terus menerus hingga tahun 2018 sebesar Rp. 5.732 triliun.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto

Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur

menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional.<sup>39</sup>

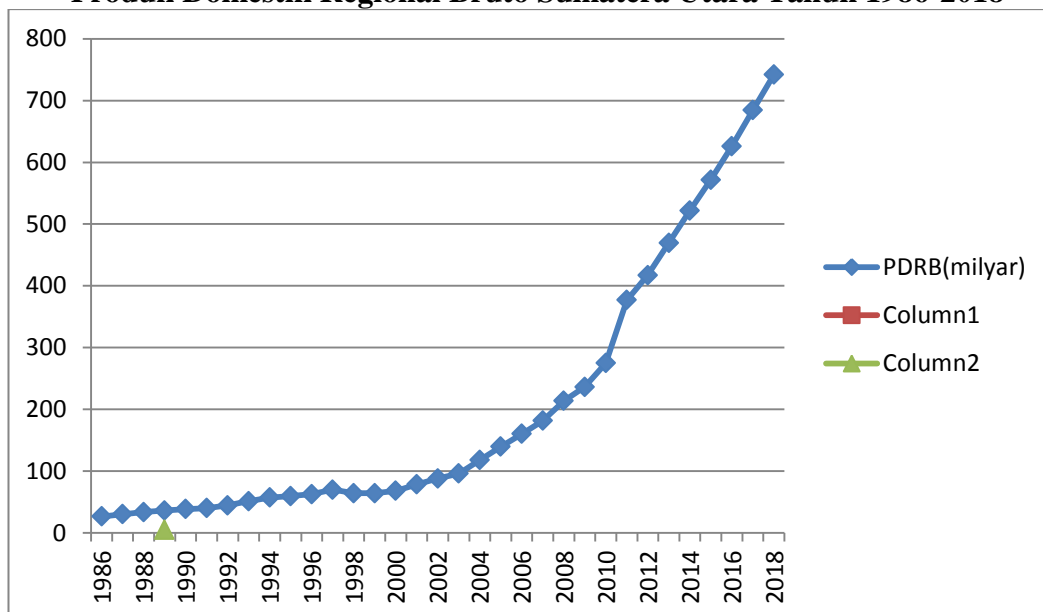
PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing<sup>40</sup>. PDRB adalah hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Perkembangan produk domestik regional bruto yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun Sebagaimana dapat dilihat pada gambar IV.2 berikut:

---

<sup>39</sup> Rahardjo Adisasmita, , *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah (GRAHA ILMU, )* (Yogyakarta:, 2013), h.57.

<sup>40</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar, (: PT. Raja Grafindo Persada )* (Jakarta, 2011), h. 35.

**Gambar IV.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Tahun 1986-2018**



Berdasarkan gambar IV.2 diatas Perkembangan perkembangan PDRB yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dimana dari tahun 1986 senilai Rp. 26 Miliar dan 2018 PDRB mencapai Rp. 741 Miliar.

Selain PDRB faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pengeluaran pemerintah dimana pemerintah harus memulai terlebih dahulu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan daerah secara merata.

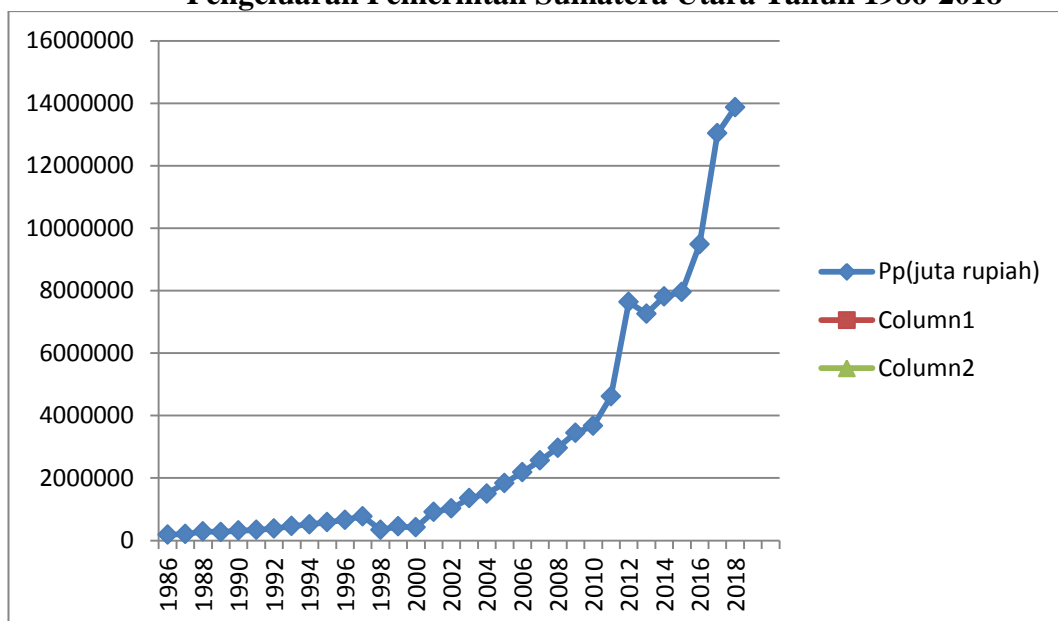
### 3. Pengeluaran Pemerintah

Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono Sukirno adalah pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan

ke atas jasa-jasa. Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang terjadi di Sumatera Utara, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik IV.3 berikut:

**Gambar IV.3**  
**Pengeluaran Pemerintah Sumatera Utara Tahun 1986-2018**



Berdasarkan gambar IV.3 diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun 1998 pengeluaran pemerintah menurun menjadi Rp. 342 juta kemudian meningkat kembali tahun 1999 sebesar Rp. 449 juta dan menurun pada tahun 2000. Kemudian meningkat

kembali hingga tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 7,6 miliar dan tahun 2013 menurun sebesar Rp. 7,2 miliar dan untuk tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan mencapai Rp. 13,8 miliar pada tahun 2018.

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Menjelaskan cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun tabel distribusi frekuensi gambar maupun batang diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, mean, dan variasi kelompok melalui rentang simpang buku. Statistik deskriptif adalah gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Deskriptif**

	PAD	PDRB	PP
Mean	2030610.	1728155.	1409684.
Median	2062709.	1746830.	1383659.
Maximum	2246940.	1812195.	1644506.
Minimum	1695300.	1573626.	1213599.
Std. Dev	165133,1	70787,13	134139,2
Observations	33	33	33

*Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020*

Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa variabel pendapatan asli daerah dengan jumlah data (N) sebanyak 33 mempunyai nilai mean sebesar Rp 2.030.610 dengan nilai minimum sebesar Rp 1.695.300 dan nilai maksimum sebesar Rp 2.246.940, sedangkan standard deviasi sebesar Rp 165.133,1. Variabel produk domestik regional bruto dengan jumlah data (N) sebanyak 33

mempunyai nilai mean sebesar 1.728.155 dengan nilai minimum sebesar 1.573.626 dengan nilai maksimum sebesar 1.812.195, sedangkan standard deviasi sebesar 70.787,13 . Variabel pengeluaran pemerintah dengan jumlah data (N) 33 mempunyai nilai mean sebesar 1.409.684 dengan nilai minimum sebesar 1.213.599 dengan nilai maksimum sebesar 1.644.506. sedangkan standard deviasi sebesar 134.139,2

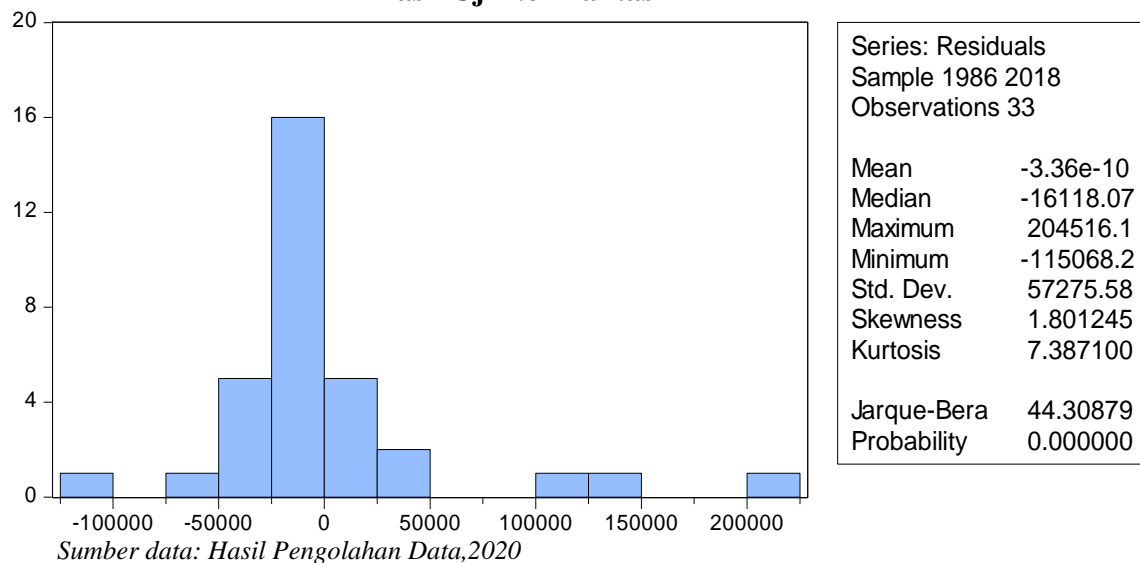
Jadi kesimpulan secara *descriptive* bahwa nilai minimum produk domestik regional bruto lebih besar dari pengeluaran pemerintah, kemudian nilai maximum produk domestik regional bruto lebih besar dari pengeluaran pemerintah, selanjutnya nilai rata-rata produk domestik regional bruto lebih besar dari pengeluaran pemerintah, dan nilai standar deviasi pengeluaran pemerintah lebih besar dari produk domestik regional bruto.

## 2. Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah berdistribusi normal. Meskipun demikian , untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan *evIEWS* menggunakan cara *uji Jarque-Bera*. Keputusan berdistribusi normal atau tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat signifikansi 0,05 persen. Apabila nilai probabilitas JB

hitung lebih besar dari 0,05 persen maka residual berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai probabilitas JB lebih kecil dari 0,05 persen maka residual tidak berdistribusi normal.

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Normalitas**



Berdasarkan gambar IV.5 di atas, diketahui bahwa nilai *Probability Jarque Bera* sebesar 44,30879 jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikan 0,05 maka  $44,30879 > 0,05$ . Dengan demikian data penelitian ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Y), Produk Domestik Regional Bruto (X1), dan Pengeluaran Pemerintah (X2) dapat dikatakan berdistribusi normal.

### 3. Uji Linieritas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Eviews*, dengan kriteria dua variabel.



Kriteria dalam uji linearitas adalah dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) lebih kecil dari 0,05

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Linieritas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1123797.	266817.9	4.211849	0.0002
PDRB	-0.423674	0.149028	-2.842919	0.0080
PP	1.162662	0.078644	14.78387	0.0000
R-squared	0.879699	Mean dependent var		2030610.
Adjusted R-squared	0.871678	S.D. dependent var		165133.1
S.E. of Regression	59153.96	Akaike info criterion		24.90018
Sum squared Resid	1.05E+11	Schwarz Criterion		25.03623
Log Likelihood	-407.8530	Hannan-Quinn Criter		24.94596
F-statistic	109.6868	Durbin-Watson		1.115505
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat dilihat bahwa variabel produk domestik regional bruto dengan nilai prob<sub>hitung</sub> < 0,05 atau 0.0080 < 0,05 sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dengan nilai prob<sub>hitung</sub> < 0,05 atau 0.0000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel produk domestik regional bruto dan variabel pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang linier.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik *Multikolinearitas*, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Ada atau tidaknya gangguan *multikolinearitas* dapat

diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas di bawah dari 0,90 maka tidak terjadi *multikolinearitas*.

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	PDRB	PP
PDRB	1.000000	0,131922
PP	0,131922	1.000000

Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah (variabel independen) tidak terdapat nilai  $>0,90$ . Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen.. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *white*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat heteroskedastisitas

$H_1$  = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$p\text{-value} > \alpha = H_0$  diterima

$p\text{-value} < \alpha = H_0$  ditolak

**Tabel IV. 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastitas**

Heteroskedasticity Test: White

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.80E+12	8.11E+11	3.448938	0.0019
PDRB^2	-2626493.	1021731.	-2.570631	0.0160
PP^2	0.070797	0.247295	0.286288	0.7768

Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan hasil tabel IV.8 di atas nilai probabilitas dari kedua variabel lebih besar dari  $\alpha$  (*alpha*) 0,05, dimana produk domestik regional bruto sebesar 0.0160 dan pengeluaran pemerintah sebesar 0.7768 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh hasil yaitu  $H_0$  diterima dan disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut<sup>41</sup>:

- 1) Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$ , maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

<sup>41</sup> Setiawan dan Dwi Endah Kusri, , *Ekonometrika (: CV Andi Offset, )*, (Yogyakarta, 2010), h, 81.

- 2) Jika  $d$  terletak antara  $d_U$  dan  $(4-d_U)$ , maka hipotesis diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Jika  $d$  terletak  $d_L$  maka  $d_U$  atau diantara  $(4-d_U)$  dan  $(4-d_L)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota rangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.167928	Mean dependent var	-3.36E-10
Adjusted R-squared	0.049061	S.D. dependent var	57275.58
S.E. of regression	55852.92	Akaike info criterion	24.83756
Sum squared resid	8.73E+10	Schwarz criterion	25.06430
Log likelihood	-404.8197	Hannan-Quinn criter.	24.91385
F-statistic	1.412735	Durbin-Watson stat	1.853446
Prob(F-statistic)	0.255520		

Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan hasil tabel IV.9 di atas diperoleh nilai DW sebesar 1.853.446 sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data ( $n$ ) = 33 dan jumlah variabel ( $k$ ) = 3 diperoleh nilai  $d_L$  sebesar 1,2576 dan  $d_U$  sebesar 1,6511 . dimana  $(4-d_U)$  diperoleh hasil sebesar 2,3489 , karena nilai DW =1.853.446 terletak antara  $d_U = 1,6511$  dan  $(4-d_U) = 2,3489$ , dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

## 5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien

regresinya.<sup>42</sup> Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independent variable* (X) terhadap dependent variable (Y).

**Tabel IV.10**  
**Hasil Estimasi Regresi**

Dependent Variable: PAD  
Method: Least Squares  
Date: 06/25/20 Time: 09:41  
Sample: 1986 2018  
Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1123797.	266817.9	4.211849	0.0002
PDRB	-0.423674	0.149028	-2.842919	0.0080
PP	1.162662	0.078644	14.78387	0.0000
R-squared	0.879699	Mean dependent var		2030610.
Adjusted R-squared	0.871678	S.D. dependent var		165133.1
S.E. of Regression	59153.96	Akaike info criterion		24.90018
Sum squared Resid	1.05E+11	Schwarz Criterion		25.03623
Log Likelihood	-407.8530	Hannan-Quinn Criter		24.94596
F-statistic	109.6868	Durbin-Watson		1.115505
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, maka persamaan analisis regresi berganda penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$PAD = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PP + e$$

$$PAD = 1123797 + -0.423674 PDRB + 1.162662 PP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diartikan bahwa:

<sup>42</sup> Iqbal Hasan, , *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (: PT Bumi Aksara,)* (Jakarta, 2004), h, 107.

- a. Nilai konstanta sebesar 1123797 artinya jika produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah bernilai 0, pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 1123797 Miliar.
- b. Nilai koefisien variabel produk domestik regional bruto bernilai negative yaitu -0.423674 bernilai negatif artinya bahwa setiap penurunan produk domestik regional 1 miliar rupiah dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap, maka pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp -0.42367 miliar.
- c. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah yaitu 1.162662 artinya bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah Rp. 1 juta maka pendapatan asli daerah naik sebesar Rp 1.162662 juta dengan nilai  $1123797+1.162662= 1.123.798,162662$  dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dianggap tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi linear berganda, yaitu merupakan persentase sumbangan variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Besarnya persentase sumbangan ini disebut Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Yang ukurannya adalah semakin tinggi  $R^2$  maka garis regresi sampel semakin baik juga. Jika  $R^2$

mendekati 1 maka variabel independen mampu menjelaskan perubahan dari variabel dependen. Tetapi jika  $R^2$  mendekati 0, maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen.

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.879699
Adjusted R-squared	0.871678
S.E. of regression	59153.96
Sum squared resid	1.05E+11
Log likelihood	-407.8530
F-statistic	109.6868
Prob(F-statistic)	0.000000

*Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020*

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil angka Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.879699. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat diterangkan oleh variabel produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah sebesar 87,96 persen dan sisanya 12,04 persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar model.

#### **b. Uji t-test (Uji t)**

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dibandingkan dengan  $t$  tabel. Nilai  $t$  tabel diperoleh dengan menggunakan tabel  $t$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 dengan rumus  $df = n - k$ ,  $n$  adalah jumlah seluruh observasi dan  $k$  adalah banyaknya variabel dalam regresi termasuk variabel tak bebas. Dalam penelitian ini  $n$  berjumlah 33 dan  $k$  berjumlah 3, sehingga  $df$  yang diperoleh 30 pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05, nilai  $t$  tabel sebesar 1,69726. Kriteria ujinya adalah sebagai berikut:

$t_{hitung} > t_{tabel} = H_0$  ditolak  $H_a$  diterima

$-t_{hitung} < -t_{tabel} = H_0$  ditolak  $H_a$  diterima

$-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel} = H_0$  diterima  $H_a$  ditolak

**Tabel IV.12**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1123797.	266817.9	4.211849	0.0002
PDRB	-0.423674	0.149028	-2.842919	0.0080
PP	1.162662	0.078644	14.78387	0.0000

Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas hasil uji hipotesis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas hasil nilai produk domestik regional bruto diperoleh sebesar -2.842919. Sehingga  $t_{tabel} (1, 69726) > t_{hitung} (1, 69726)$  maka  $H_1$  diterima artinya bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

- 2) Pengaruh pengeluaran pemerintah

Berdasarkan hasil uji t di atas nilai pengeluaran pemerintah diperoleh sebesar 14.78387 sehingga  $t_{tabel} (1, 69726) < t_{hitung} (14.78387) > t_{tabel} (1, 69726)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima artinya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### c. Uji Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.



$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 1986-2018.

$H_a$  : Terdapat pengaruh pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera periode 1986-2018.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$ . Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 derajat pembilang ( $dk_1$ ) dihitung menggunakan rumus  $k-1$ , dimana  $n$  adalah jumlah seluruh observasi dan  $k$  adalah jumlah seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 33 dan jumlah variabel adalah 3, maka  $dk_1$  adalah 2 dan  $dk_2$  adalah 30. Nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh adalah 3,32, ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0 \text{ ditolak}$$

$$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0 \text{ diterima}$$

**Tabel IV.13**  
**Hasil Uji F**

F-statistic	109.6868
Prob (F-statistic)	0.000000

*Sumber data: Hasil Pengolahan Data, 2020*

Berdasarkan tabel IV.13 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji F di atas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $109.6868 > 3,32$  dan  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah berpengaruh

secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program *Eviews* versi 9.

Hasil analisis regresi linear berganda diketahui nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini adalah 1.123.797 artinya bahwa produk domestik regional bruto (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) bernilai 0 maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 1.123.797 miliar. Nilai koefisien variabel produk domestik regional bruto -0.423.674 artinya bahwa setiap penurunan produk domestik regional bruto 1 miliar rupiah maka pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp -0.423.674 milyar, dengan asumsi produk domestik regional bruto dianggap tetap. Koefisien pada regresi produk domestik regional bruto sebesar -0.423.674 bernilai negative artinya jika menurun 1 juta rupiah, maka pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar -0.423.674 juta, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,894985. Hal ini berarti bahwa variansi variabel pendapatan asli daerah secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh produk domestik regional bruto dan pengeluaran

pemerintah sebesar 89,49 persen sedangkan 10,51 persen sisanya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini.

Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas hasil nilai produk domestik regional bruto diperoleh sebesar -2.842.919. Sehingga  $t_{\text{tabel}}(1, 69726) > t_{\text{hitung}}(1, 69726)$  maka  $H_1$  diterima artinya bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh chakim dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah (PAD) untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari yang berjudul “ Pengaruh variabel makro terhadap penerimaan pendapatan asli daerah periode

2003-2007 di kabupaten Karangayar” yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.

b. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas nilai pengeluaran pemerintah diperoleh sebesar 14.78387 sehingga  $t_{\text{tabel}}(1, 69726) < t_{\text{hitung}}(14.78387) > t_{\text{tabel}}(1,69726)$  maka  $H_2$  diterima artinya bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori Arief Eka Atmaja dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik menunjang kegiatan ekonomi dalam hal ini pemerintah menetapkan pajak dan retribusi yang akan menambah PAD.

Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indahsari yang berjudul “Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur 2016-2017” yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

- c. Pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah

Hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $109.6868 > 3,32$  dan  $H_3$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini didukung oleh teori Harry A.P Satianapessy yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni Erviana yang berjudul “Analisi pengaruh pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 dalam perspektif ekonomi islam” yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap PAD.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam proses penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan hasil

yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel bebas yang digunakan hanya dua, sehingga kurang maksimal dalam menjelaskan variabel terikat.
2. Data yang digunakan terbatas yaitu hanya 33 data time series.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode analisis yang digunakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji persial (uji-t) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.
2. Hasil uji persial (uji-t) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.
3. Berdasarkan uji F pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018.

## **B. Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pengaruh rasio yang sudah dimuat dalam penelitian ini agar menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah misalnya, Inflasi dan jumlah penduduk.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti rasio yang sama agar memperbanyak data penelitian dan gunakan data tahun terbaru.
3. Bagi pemerintah daerah, khususnya BPS Provinsi Sumatera Utara bahwa PDRB dan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh provinsi Sumatera Utara sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara. Namun pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan retribusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Agus Widarjono, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Aliy Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Guritno Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPEE, 2010.
- Imam Ghozali, Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011.
- Mardisamo, *Perpajakan Edisi Revisi Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016.
- Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rahardjo Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013.
- Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Sirojuzilan, *Regional Pembangunan, Perencanaan, Ekonomi*, Medan: USU press, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Todaro, MP. Dan S.C Smith, *Perekonomian Indonesia: teori dan temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

**Sumber Jurnal:**

Budi Waliyo, Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Dan Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industry Terhadap PAD Kota Depok Jawa Barat, (*Skripsi: Universitas Gunadarma*, 2012)

Hening Fitria Sarasati El Rani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)", Studi kasus Dikabupaten/Kotan Pekalongan periode 2005-2014", (*Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*), 2016.

Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, "Analisi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume , No.1, 2013.

Muhammad Safar Nasir " Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeonomi Daerah" *dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 2, Nomor, Tahun 2019.

Rosita Wahyuningtyas, "Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB" *Jurnal Gaussian*, Volume, Nomor 3, Tahun 2013

Triani dan Yeni Kuntari, pengaruh variabel makro terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) periode 2003-2007 di kabupaten karanganyar". "(*Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah*), 2016.

Umdhatul, "Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Inflasi Terhadap PAD"(*Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga*), 2016.

### **Sumber Pendukung dari Internet:**

Badan Pusat Statistik, *Sumatera-Utara-Dalam-Angka-2014*(.bps.go.id diakses 12 Januari 2020)

<https://medan.tribunnews.com>, Diakses Pada 16 Januari 2020

*Qur'anWeb.id* ( [http.quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id), diakses 18 mei 2020 pukul 04.42 WIB)

[http:// repo. Iain-tulungagung.ac.id](http://repo.iain-tulungagung.ac.id)

<http://repository.radenintan.ac.id>

Virifield email at [iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:iain-padangsidimpuan.ac.id)

[Repository.umy.ac.id](http://Repository.umy.ac.id)

Journal. [Widyamanggala.ac.id](http://Widyamanggala.ac.id)

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Nurul Armia Gultom
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasar Simangambat, 14 Maret 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 9 dari 9 Bersaudara
6. Alamat : Pasar Simangambat
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/ HP : 082286176300
9. Email : gultomnurul@gmail.com

### **II. PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 1 Saipar Dolok Hole (2003-2009)
2. SMP Negeri 1 Saipar Dolok Hole (2009-2012)
3. SMA Negeri 1 Saipar Dolok Hole (2012-2015)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2016-2020)

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

- Nama Ayah : Ramlan Gultom  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Nama Ibu : Rosmanita Siagian  
Pekerjaan Ibu : Petani  
Alamat : Pasar Simangambat

### **IV. PRESTASI AKADEMIK**

- IPK : 3,79  
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domesti Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 1986-2018

### **V. Motto Hidup**

**“Keluargaku Harta Paling Berharga Bagiku”**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 553 /In.14/G.1/PP.00.9/03/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

29 Maret 2019

Yth, Bapak ;

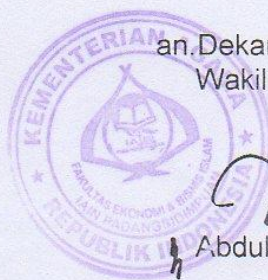
1. Budi Gautama Siregar : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut dia bawah ini :

Nama : Nurul Armia Gultom  
NIM : 1640200257  
Program Studi : Ekonomri Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara 1986 – 2015.

Untuk itu diharapkan kepada Bapak sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an.Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

**Data Tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)</b>
<b>1986</b>	23,046,000
<b>1987</b>	56,724,000
<b>1988</b>	72,116,000
<b>1989</b>	80,692,000
<b>1990</b>	90,572,000
<b>1991</b>	97,089,000
<b>1992</b>	114,284,000
<b>1993</b>	131,478,000
<b>1994</b>	153,349,000
<b>1995</b>	156,515,000
<b>1996</b>	187,738,000
<b>1997</b>	255,078,000
<b>1998</b>	396,469,000
<b>1999</b>	437,075,000
<b>2000</b>	255,100,000
<b>2001</b>	423,100,000
<b>2002</b>	614,400,000
<b>2003</b>	908,300,000
<b>2004</b>	1,143,100,000
<b>2005</b>	1,018,000,000
<b>2006</b>	1,368,200,000
<b>2007</b>	1,503,000,000
<b>2008</b>	2,181,300,000
<b>2009</b>	2,016,070,000
<b>2010</b>	2,226,500,000
<b>2011</b>	3,181,890,000
<b>2012</b>	4,052,100,000
<b>2013</b>	4,809,370,000
<b>2014</b>	3.449.002,150
<b>2015</b>	4,089,547,297
<b>2016</b>	4,541,639,863
<b>2017</b>	4,925,627,725
<b>2018</b>	5,732,425,486

**Data Tentang Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara  
tahun 1986-2018**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Milyar Rupiah)</b>
<b>1986</b>	26.665,40
<b>1987</b>	30.336,26
<b>1988</b>	33.761,16
<b>1989</b>	36.369,44
<b>1990</b>	38.582,28
<b>1991</b>	40.370,43
<b>1992</b>	44.791,37
<b>1993</b>	51.291,83
<b>1994</b>	57.430,76
<b>1995</b>	59.679,06
<b>1996</b>	62.807,52
<b>1997</b>	70.007,74
<b>1998</b>	64.411,61
<b>1999</b>	64.330,88
<b>2000</b>	68.260,77
<b>2001</b>	78.501,35
<b>2002</b>	88.117,50
<b>2003</b>	96.233,39
<b>2004</b>	118.100,51
<b>2005</b>	139.618,31
<b>2006</b>	160.376,80
<b>2007</b>	181.819,74
<b>2008</b>	213.931,70
<b>2009</b>	236.353,62
<b>2010</b>	275.056,51
<b>2011</b>	377.037,10
<b>2012</b>	417.120,44
<b>2013</b>	469.464,02
<b>2014</b>	521.954,95
<b>2015</b>	571.722,01
<b>2016</b>	626.063,00
<b>2017</b>	684.634,00
<b>2018</b>	741.756,00

**Data Tentang Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)</b>
<b>1986</b>	186.463.
<b>1987</b>	205.200.
<b>1988</b>	290.355.
<b>1989</b>	267.150.
<b>1990</b>	313.900.
<b>1991</b>	336.900.
<b>1992</b>	383.200.
<b>1993</b>	458.700.
<b>1994</b>	515.600.
<b>1995</b>	584.000.
<b>1996</b>	660.800.
<b>1997</b>	771.000.
<b>1998</b>	342.600.
<b>1999</b>	449.000.
<b>2000</b>	416.800.
<b>2001</b>	916.200.
<b>2002</b>	1.021.300.
<b>2003</b>	1.352.000.
<b>2004</b>	1.501.500.
<b>2005</b>	1.830.600.
<b>2006</b>	2.184.600.
<b>2007</b>	2.560.700.
<b>2008</b>	2.967.300.
<b>2009</b>	3.444.400.
<b>2010</b>	3.666.700.
<b>2011</b>	4.611.470.
<b>2012</b>	7.633.630.
<b>2013</b>	7.260.470.
<b>2014</b>	7.808.560.
<b>2015</b>	7.959.170.
<b>2016</b>	9.476.420.
<b>2017</b>	13,034,680
<b>2018</b>	13,867,539



## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018

Berikut adalah **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018** di Indonesia.<sup>[1]</sup> Data bersumber dari dokumen yang dikirim daerah ke DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Data dengan tanda bintang (\*) masih dalam proses verifikasi dan konfirmasi.

No.	Daerah	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Belanja Daerah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1	<b>Aceh</b>	<b>14.622.475.324.280</b>	<b>2.324.662.431.200</b>	<b>3.864.634.048.000</b>	<b>8.433.178.845.080</b>	<b>15.084.003.946.127</b>	<b>4.137.425.306.467</b>	<b>10.946.578.639.660</b>
2	Kabupaten Aceh Barat	1.251.178.454.853	164.140.534.232	782.043.595.040	304.994.325.581	1.278.779.639.369	774.263.192.291	504.516.447.078
3	Kabupaten Aceh Besar	1.662.846.328.700	132.396.380.300	977.082.148.200	553.367.800.200	1.757.856.328.700	1.144.611.951.476	613.244.377.224
4	Kabupaten Aceh Selatan	1.396.405.975.816	165.862.127.299	983.548.396.000	246.995.452.517	1.410.405.975.816	869.343.402.965	541.062.572.851
5	Kabupaten Aceh Singkil	785.723.765.808	55.232.965.901	598.216.125.000	132.274.674.907	794.578.765.808	420.750.964.326	373.827.801.482
6	Kabupaten Aceh Tengah	1.286.923.980.964	183.064.444.080	841.794.303.000	262.065.233.884	1.287.176.938.844	766.405.926.014	520.771.012.830
7	Kabupaten Aceh Tenggara	1.168.068.034.805	73.908.495.347	799.734.549.000	294.424.990.458	1.257.654.354.861	813.935.259.373	443.719.095.488
8	Kabupaten Aceh Timur	1.655.591.696.743	178.907.208.684	1.052.058.558.360	424.625.929.699	1.659.558.415.117	1.103.396.871.329	556.161.543.788
9	Kabupaten Aceh Utara	2.339.452.690.669	358.698.548.452	1.366.707.317.000	614.046.825.217	2.350.178.302.334	1.605.041.205.197	745.137.097.137
10	Kabupaten Bireuen	1.815.022.598.247	200.170.920.320	1.096.715.480.000	518.136.197.927	1.836.716.894.023	1.222.755.702.867	613.961.191.156
11	Kabupaten Pidie	2.035.566.671.524	327.642.748.009	1.123.480.454.764	584.443.468.751	2.202.718.585.042	1.335.180.032.484	867.538.552.558
12	Kabupaten Simeulue	821.754.461.397	47.764.132.000	599.101.647.000	174.888.682.397	835.164.411.797	413.850.118.688	421.314.293.109
13	Kota Banda Aceh	1.210.549.597.835	294.413.666.761	771.483.628.000	144.652.303.074	1.213.749.597.835	619.335.677.156	594.413.920.679
14	Kota Sabang	613.999.489.403	46.609.405.393	497.775.068.000	69.615.016.010	654.944.475.425	288.471.031.329	366.473.444.096
15	Kota Langsa	681.844.337.665	125.634.683.815	464.209.420.000	92.000.233.850	685.403.982.427	377.698.879.627	307.705.102.800
16	Kota Lhokseumawe	786.821.025.020	66.522.617.843	620.259.659.000	100.038.748.177	793.021.025.020	433.314.568.439	359.706.456.581
17	Kabupaten Gayo Lues	853.469.044.480	54.431.433.676	650.306.967.853	148.730.642.951	852.469.044.481	387.959.610.981	464.509.433.500
18	Kabupaten Aceh Barat Daya	896.177.626.467	89.174.113.700	666.076.963.000	140.926.549.767	1.131.157.175.062	498.289.071.021	632.868.104.041
19	Kabupaten Aceh Jaya	828.068.492.568	55.922.676.525	587.910.775.000	184.235.041.043	846.567.155.647	493.073.113.147	353.494.042.500
20	Kabupaten Nagan Raya	1.101.758.962.434	119.433.776.287	675.784.853.000	306.540.333.147	1.137.442.705.073	618.515.635.857	518.927.069.216
21	Kabupaten Aceh Tamiang	1.175.611.272.018	141.815.373.710	796.059.110.000	237.736.788.308	1.199.611.272.018	591.448.678.034	608.162.593.984
22	Kabupaten Bener Meriah	915.387.145.591	116.273.260.300	585.910.885.000	213.203.000.291	915.387.145.591	503.509.064.994	411.878.080.597
23	Kabupaten Pidie Jaya	858.119.481.051	70.000.000.000	618.172.475.000	169.947.006.051	1.189.530.266.695	791.975.168.297	397.555.098.398
24	Kota Subulussalam	589.303.463.308	57.419.897.294	438.512.978.000	93.370.588.014	598.252.028.639	310.523.726.046	287.728.302.593
25	<b>Sumatra Utara</b>	<b>13.037.539.478.554</b>	<b>5.732.425.486.154</b>	<b>7.295.580.089.900</b>	<b>9.533.902.500</b>	<b>13.867.539.478.554</b>	<b>9.287.573.660.704</b>	<b>4.579.965.817.850</b>

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017

Berikut adalah **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017** di Indonesia.<sup>[1]</sup> Data bersumber dari dokumen yang dikirim daerah ke DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Data dengan tanda bintang (\*) masih dalam proses verifikasi dan konfirmasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017

No.	Daerah	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Belanja Daerah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1	<b>Aceh</b>	<b>14.291.939.315.863</b>	<b>2.227.055.653.755</b>	<b>3.741.189.009.600</b>	<b>8.323.694.652.508</b>	<b>14.733.699.981.655</b>	<b>7.272.664.777.982</b>	<b>7.461.035.203.673</b>
2	Kabupaten Aceh Barat	1.350.732.034.050	149.228.601.189	782.481.765.000	419.021.667.861	1.408.314.314.071	807.676.751.487	600.637.562.584
3	Kabupaten Aceh Besar	1.768.187.987.731	113.700.553.300	964.148.251.206	690.339.183.225	1.912.334.171.883	1.229.841.936.022	682.492.235.861
4	Kabupaten Aceh Selatan	1.459.148.845.222	118.286.755.672	940.427.083.000	400.435.006.550	1.471.148.845.222	880.323.173.653	590.825.671.569
5	Kabupaten Aceh Singkil	861.799.747.532	49.595.582.180	585.875.852.791	226.328.312.561	898.389.281.735	414.188.837.456	484.200.444.279
6	Kabupaten Aceh Tengah	1.500.755.341.736	156.824.996.423	878.418.088.406	465.512.256.907	1.497.208.299.616	838.714.660.326	658.493.639.290
7	Kabupaten Aceh Tenggara	1.378.585.508.501	74.180.495.347	753.577.101.000	550.827.912.154	1.432.003.048.097	719.616.522.537	712.386.525.560
8	Kabupaten Aceh Timur	1.943.550.881.831	113.564.667.525	1.211.030.029.857	618.956.184.449	1.887.330.057.391	1.092.289.986.549	795.040.070.842
9	Kabupaten Aceh Utara	2.701.388.665.096	247.111.499.871	1.575.506.163.245	878.771.001.980	2.714.589.771.909	1.736.483.186.802	978.106.585.107
10	Kabupaten Bireuen	2.051.260.256.160	191.416.743.709	1.169.358.847.889	690.484.664.562	2.051.260.256.160	1.292.507.799.635	758.752.456.525
11	Kabupaten Pidie	2.141.365.388.017	307.687.536.671	1.090.577.878.764	743.099.972.582	2.219.372.102.909	1.350.771.313.378	868.600.789.531
12	Kabupaten Simeulue	989.799.313.870	44.260.454.384	642.955.000.768	302.583.858.718	1.011.875.012.638	449.906.703.361	561.968.309.277
13	Kota Banda Aceh	1.247.693.437.876	240.438.164.073	763.384.067.000	243.871.206.803	1.248.393.437.876	621.774.297.721	626.619.140.155
14	Kota Sabang	655.130.567.729	48.885.657.700	452.700.881.000	153.544.029.029	670.130.567.729	297.533.512.771	372.597.054.958
15	Kota Langsa	987.957.855.434	124.092.504.605	646.024.111.000	217.841.239.829	1.025.196.366.757	442.973.791.430	582.222.575.327
16	Kota Lhokseumawe	882.067.739.714	69.702.917.843	627.233.404.714	185.131.417.157	905.824.453.232	471.615.855.172	434.208.598.060
17	Kabupaten Gayo Lues	975.212.695.553	46.974.515.723	583.247.634.853	344.990.544.977	974.212.695.553	427.205.731.890	547.006.963.663
18	Kabupaten Aceh Barat Daya	985.455.076.513	83.358.445.530	631.526.645.536	270.569.985.447	1.049.635.904.133	534.260.058.751	515.375.845.382
19	Kabupaten Aceh Jaya	961.348.790.164	58.602.987.732	539.146.952.000	363.598.850.432	1.009.187.374.519	510.370.883.139	498.816.491.380
20	Kabupaten Nagan Raya	1.259.931.507.243	100.331.980.315	648.370.048.000	511.229.478.928	1.342.388.146.373	672.048.991.772	670.339.154.601
21	Kabupaten Aceh Tamiang	1.241.189.072.017	128.487.282.902	766.184.655.000	346.517.134.115	1.276.189.072.017	604.141.696.208	672.047.375.809
22	Kabupaten Bener Meriah	1.061.887.239.332	98.074.368.300	588.188.506.439	375.624.364.593	1.081.047.135.880	561.444.249.747	519.602.886.133
23	Kabupaten Pidie Jaya	960.340.791.041	49.328.412.381	565.960.007.000	345.052.371.660	979.921.257.017	509.168.580.491	470.752.676.526
24	Kota Subulussalam	733.607.968.314	55.926.797.294	470.063.792.647	207.617.378.373	738.107.968.314	283.345.349.298	454.762.619.016
25	<b>Sumatra Utara</b>	<b>12.170.582.105.913</b>	<b>4.925.627.725.733</b>	<b>7.235.420.477.680</b>	<b>9.533.902.500</b>	<b>13.034.684.291.945</b>	<b>8.752.069.621.945</b>	<b>4.282.614.670.000</b>

## Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2017 - 2019

Rincian	2017	2018 <sup>*)</sup>	2019 <sup>**)</sup>
<b>I Atas Dasar Harga Berlaku</b>			
- Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah)	684 634,43	741 751,63	801 733,34
- Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	14 262 147	14 415 391	14 562 549
- Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (juta rupiah)	48	51.46	55.05
<b>II Atas Dasar Harga Konstan 2010</b>			
- Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah)	487 531,23	512 765,63	539 526,60
- Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	14 262 147	14 415 391	14 562 549
- Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (juta rupiah)	34.18	35.57	37.05

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

<sup>1)</sup>Proyeksi Penduduk 2010-2035

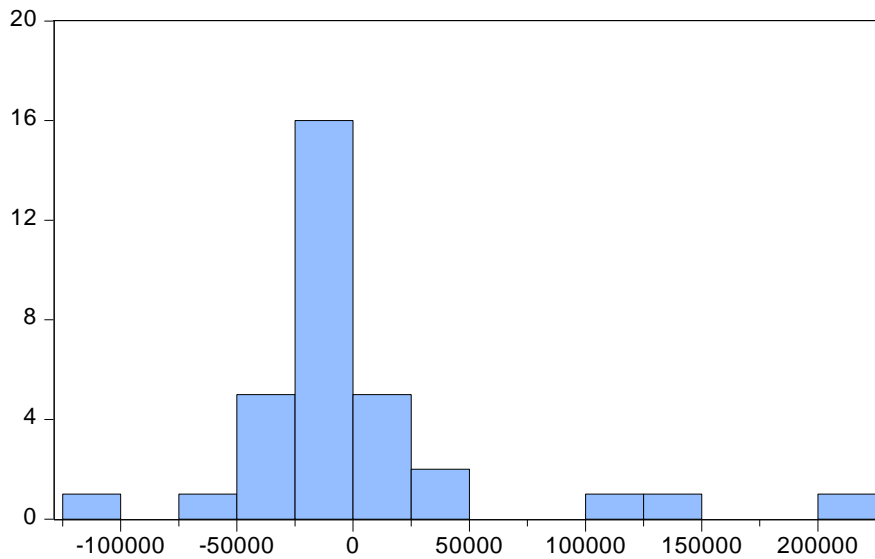
DAFTAR DATA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB  
DI SUMATERA UTARA

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
1986	186.463	26.665.409
1987	205.200	30.336.268

DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 1986-2016  
(DALAM MILYAR RUPIAH)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1986	23,046,000
1987	56,724,000

Mean	2030610.	1728155.	1409684.
Median	2062709.	1746830.	1383659.
Maximum	2246940.	1812195.	1644506.
Minimum	1695300.	1573626.	1213599.
Std. Dev.	165133.1	70787.13	134139.2
Skewness	-0.233412	-0.780772	0.282220
Kurtosis	1.740106	2.427604	1.732480
Jarque-Bera	2.482230	3.803332	2.647152
Probability	0.289062	0.149320	0.266182
Sum	67010120	57029125	46519577
Sum Sq. Dev.	8.73E+11	1.60E+11	5.76E+11
Observations	33	33	33



<b>Series: Residuals</b>	
Sample 1986 2018	
Observations 33	
Mean	-3.36e-10
Median	-16118.07
Maximum	204516.1
Minimum	-115068.2
Std. Dev.	57275.58
Skewness	1.801245
Kurtosis	7.387100
Jarque-Bera	44.30879
Probability	0.000000

	PDRB	PP
PDRB	1.000000	0,131922
PP	0,131922	1.000000

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	4.336808	Prob. F(5,27)	0.0050
Obs*R-squared	14.69831	Prob. Chi-Square(5)	0.0117
Scaled explained SS	38.79322	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/09/20 Time: 07:47

Sample: 1986 2018

Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.80E+12	8.11E+11	3.448938	0.0019
PDRB^2	0.644658	0.452583	1.424398	0.1658
PDRB*PP	0.285955	0.560858	0.509852	0.6143
PDRB	-2626493.	1021731.	-2.570631	0.0160
PP^2	0.070797	0.247295	0.286288	0.7768
PP	-724648.9	433556.9	-1.671404	0.1062
R-squared	0.445403	Mean dependent var		3.18E+09
Adjusted R-squared	0.342700	S.D. dependent var		8.16E+09
S.E. of regression	6.62E+09	Akaike info criterion		48.22725
Sum squared resid	1.18E+21	Schwarz criterion		48.49935
Log likelihood	-789.7497	Hannan-Quinn criter.		48.31881
F-statistic	4.336808	Durbin-Watson stat		1.206093
Prob(F-statistic)	0.005021			

Dependent Variable: PAD  
 Method: Least Squares  
 Date: 08/09/20 Time: 07:38  
 Sample: 1986 2018  
 Included observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1123797.	266817.9	4.211849	0.0002
PDRB	-0.423674	0.149028	-2.842919	0.0080
PP	1.162662	0.078644	14.78387	0.0000
R-squared	0.879699	Mean dependent var		2030610.
Adjusted R-squared	0.871678	S.D. dependent var		165133.1
S.E. of regression	59153.96	Akaike info criterion		24.90018
Sum squared resid	1.05E+11	Schwarz criterion		25.03623
Log likelihood	-407.8530	Hannan-Quinn criter.		24.94596
F-statistic	109.6868	Durbin-Watson stat		1.115505
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)**

df	Pr 0.50	0.25 0.20	0.10 0.10	0.05 0.050	0.025 0.02	0.01 0.010	0.005 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$

k=1	k=2	k=3	k=4	k=5						
n	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002		-						
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673